

ABSTRAK

Penyakit Covid-19 merupakan penyakit menular yang memiliki dampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Upaya untuk menanggulangi penyebaran covid 19 tersebut, maka perintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kota/kabupaten. Berbagai macam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah upaya penanggulangan pandemik covid-19, salah satu diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menerapkan PSBB untuk penanganan Covid19 terkesan bermuatan politis, hal dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang membuat tidak konsisten dan dapat menimbulkan responden negatif dari masyarakat. Nuansa politisasi virus corona oleh Pemprov DKI dijadikan sebagai sarana politik untuk menyalonkan dirinya di pemilihan presiden tahun 2024. Penelitian ini di bertujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan politik dalam penanganan pandemi covid-19 melalui PSBB di Prov DKI Jakarta

Penelitian ini menggunakan metode riset lapangan (field research) yaitu metode dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif interpretative, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menangani Covid 19 seperti kebijakan PSBB yang tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2020 bertujuan untuk menekan laju persebaran covid 19 di Jakarta. Kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan masih mengalami hambatan yang berasal dari faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah. Selain itu, koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menimbulkan ketidakpastian langkah-langkah strategis dan dapat menimbulkan kebingungan publik dalam memahami situasi pandemi.

Kata Kunci : Kebijakan, PSBB, Dinamika, Politik

ABSTRACT

Covid-19 disease is an infectious disease that has an impact on the joints of people's lives including social, economic, political and others. Efforts to overcome the covid 19 outbreak, the order issued various policies that can be applied both at the central, provincial and city / district levels. Various policies that have been set by the central and local governments to counter the covid-19 pandemic, one of which is Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The local government of DKI Jakarta in implementing PSBB for the handling of Covid19 seems politically charged, it can be seen from the policies of the Provincial Government of DKI that make it inconsistent and can cause negative respondents from the community. The nuances of the politicization of corona virus by the Provincial Government of Dki Jakarta are used as a political means to clone itself in the 2024 presidential election. This research aims from this research is to find out and analyze political policies in the handling of the covid-19 pandemic through PSBB in Dki Jakarta Province.

This research uses field research method which is documentation and interview method. The collected data is then analyzed using interpretative descriptive analysis methods, using qualitative approaches.

From the results of the research obtained the results of public policy implemented by the dki jakarta government to handle Covid 19 as stated in Pergub number 33 year 2020 aims to reduce the rate of spread of covid 19 in Jakarta. Policies and efforts made in handling are still experiencing obstacles stemming from the factors of public disobedience to health protocols and PSBB policies implemented by the government. In addition, weak coordination between the central and local governments will create uncertainty of stratgis measures and may cause public confusion in understanding the pandemic situation.

Keyword: Policy, PSBB, Dynamics, Politics